

ANALISIS PEMANFAATAN RUANG DI KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR

Aria Gusandra¹⁾

*Program Pascasarjana Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Pakuan
hudaeka0996@gmail.com*

Janthy T. Hidayat²⁾

*Program Pascasarjana Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Pakuan*

Titik Penta Artiningsih³⁾

*Program Pascasarjana Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Pakuan*

ABSTRAK

Kecamatan Bogor Selatan menjadi salah satu wilayah pertumbuhan yang berpotensi terjadinya *Urban Sprawl* akibat pertumbuhan kawasan terbangun yang pesat. Pertumbuhan pesat yang tidak diimbangi oleh pengendalian pemanfaatan ruang akan berpotensi terjadinya inkonsistensi pemanfaatan ruang. Tujuan penelitian adalah untuk 1. menganalisis konsistensi pemanfaatan ruang di Kecamatan Bogor Selatan dan 2. menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi dan inkonsistensi pemanfaatan ruang. Metode yang dilakukan meliputi 1. pertampalan peta antara peta rencana pola ruang dengan peta penggunaan lahan eksisting dan 2. terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi inkonsistensi pemanfaatan ruang dilakukan wawancara terhadap subjek pemanfaatan ruang yang inkonsistensi untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi inkonsistensi pemanfaatan ruang. Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang Kecamatan Bogor Selatan seluas 2.885,23 hektar (94,67%) dengan tingkat konsistensi paling tinggi berada di Kelurahan Mulyaharja. Inkonsistensi pemanfaatan ruang seluas 162,44 hektar (5,33%) yang paling banyak terjadi di Kelurahan Genteng. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya inkonsistensi pemanfaatan ruang yaitu kebutuhan tempat tinggal, kurangnya pengawasan dan penertiban, ketersediaan fasilitas Kesehatan dan kebutuhan ekonomi.

Kata Kunci : Pemanfaatan ruang, penggunaan lahan, konsistensi, inkonsistensi, faktor pengaruh inkonsistensi

ABSTRACT

South Bogor District is one of the growth areas that has the potential for Urban Sprawl due to the rapid growth of built-up areas. Rapid growth that is not matched by controlling the use of space will potentially lead to inconsistencies in the use of space. The research objectives were 1. to analyze the consistency of spatial use in South Bogor District and 2. to analyze the factors that influence the consistency and inconsistency of spatial use. The methods used include 1. map overlay between the spatial pattern plan map and the existing land use map and 2. to the factors that influence the inconsistency of spatial use, interviews are conducted with the subject of inconsistent spatial use to obtain factors that influence the inconsistency of spatial use. The consistency level of spatial use in South Bogor District is 2,885.23 hectares (94,67%) with the highest level of consistency in the Mulyaharja Village. Inconsistency in the use of space covering an area of 162,44 hectares (5.33%) is the most common in the Genteng Village. The factors that influence the occurrence of inconsistencies in the use of space are the need for housing, lack of supervision and control, availability of health facilities and economic needs.

Keywords : *Spatial use, land use, consistency, inconsistency, factors influencing inconsistency*

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan ruang secara fisik ditandai oleh pertumbuhan fisik kota yang pesat pada pinggiran kota yang mana cenderung menjadikan kawasan perkotaan secara fisik

meluas secara acak dan semakin tidak terkendali (*Urban Sprawl*). (Hidayat dkk. 2014). *Urban Sprawl* dapat terjadi akibat perkembangan infrastruktur cepat dan pembangunan kegiatan industri dan perumahan.

Pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan penduduk serta aktivitas manusia yang pesat di Kota Bogor, menyebabkan perkembangan pemanfaatan ruang yang relatif pesat. Desakan kebutuhan ruang di pusat Kota Bogor menyebabkan terbatasnya ruang di pusat Kota Bogor, sehingga perkembangannya meluas ke wilayah di sekitarnya. Kecamatan Bogor Selatan merupakan kecamatan yang berpotensi berkembang ke arah *Urban Sprawl*.

Desakan pemanfaatan ruang dan batasan pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011-2031 di khawatirkan akan menimbulkan inkonsistensi pemanfaatan ruang di wilayah Bogor Selatan. Sehingga, sebelum terjadinya inkonsistensi pemanfaatan ruang lebih lanjut, diperlukan kajian komprehensif untuk menentukan sejauh mana inkonsistensi pemanfaatan ruang terjadi di wilayah Bogor Selatan sebagaimana dilakukan di dalam penelitian ini. Lebih lanjut lagi, diperlukan langkah strategis dalam menangani permasalahan inkonsistensi pemanfaatan ruang baik dari kebijakan maupun sosial masyarakat.

II. METODOLOGI

2.1. Analisis Konsistensi dan Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui area atau sebaran pemanfaatan ruang eksisting yang konsisten maupun yang inkonsisten terhadap rencana Pola Ruang. Untuk mencapai tahapan mengetahui pemanfaatan ruang yang konsisten maupun inkonsisten terhadap pola ruang, terdapat beberapa analisis yang dilakukan terlebih dahulu.

Analisis dilakukan melalui 6 tahapan yang terdiri dari koreksi geometris citra satelit, digitasi citra satelit, penyesuaian klasifikasi penggunaan lahan, analisis overlay menggunakan perangkat GIS, penilaian konsistensi pemanfaatan ruang dan penilaian tingkat kesengajaan inkonsistensi pemanfaatan ruang.

Koreksi geometris citra satelit dilakukan untuk menyiapkan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar penentuan penggunaan lahan. Koreksi geometri dimaksudkan untuk memperbaiki lokasi obyek pada citra pada posisi yang sebenarnya secara geometris dihitung berdasarkan jumlah dan sebaran titik kontrol serta model fungsi matematik terhadap ketelitian geometri. Metode yang dilakukan yaitu dengan

metode *Image to Image* yang merupakan penyesuaian posisi geometris citra satelit dengan titik ikat berupa data geospasial yang telah diakurasi.

Selanjutnya, untuk menilai bagaimana citra satelit telah terkoreksi dengan baik, dilakukan penilaian akurasi. Nilai akurasi *Ground Control Points* (GCP) ditunjukkan oleh nilai *Root Mean Square Error* (RMS-error) yang menyatakan nilai kesalahan dari proses koreksi geometri. Akurasi yang baik ditunjukkan oleh nilai RMS-error yang sangat kecil mendekati nol. Perhitungan RMS-error dengan menggunakan persamaan berikut :

$$\text{RMS-error} = \sqrt{(X-x) + (Y-y)}$$

Keterangan :

X dan Y = Koordinat citra asli (*input*)

x dan y = Koordinat citra keluaran (*output*).

Setelah citra satelit selesai dilakukan koreksi geometri, selanjutnya dilakukan pemutakhiran data penggunaan lahan. Pemutakhiran data dilakukan dengan basis data berupa data Rupabumi Indonesia (RBI) yang didalamnya terdapat data spasial penggunaan lahan. Data spasial penggunaan lahan di dalam RBI merupakan data yang dibuat pada tahun 2011, sehingga diperlukan proses pemutakhiran dengan dilakukan digitasi. Digitasi dilakukan menggunakan teknik *reshape*, dimana pada teknik tersebut, pemutakhiran data dilakukan pada lokasi yang mengalami perubahan secara signifikan, sehingga pada proses tersebut, lokasi-lokasi lain yang tidak mengalami perubahan akan tetap memiliki luas dan bentuk spasial yang sama. Adapun dalam melakukan klasifikasi penutup lahan, penulis mengacu pada SNI 7645 : 2010 tentang klasifikasi penutup lahan.

Selanjutnya dilakukan penyesuaian klasifikasi penggunaan lahan. Penyesuaian klasifikasi penggunaan lahan dimaksudkan untuk menyesuaikan muatan-muatan kegiatan penggunaan lahan yang diperbolehkan dilakukan di dalam masing-masing peruntukan rencana pola ruang. Penyesuaian klasifikasi tersebut mengacu pada muatan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) yang termuat dalam dokumen Perda Kota Bogor No 8 Tahun 2011 serta perubahannya dalam Perda No 6 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Bogor.

Hasil akhir dari analisis ini akan diketahui lokasi-lokasi objek yang menunjukkan adanya inkonsistensi dan konsistensi pemanfaatan ruang di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

2.2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya inkonsistensi pemanfaatan ruang. Analisis dilakukan melalui penentuan variabel faktor penduga dengan melakukan studi komparatif melalui penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Setelah diketahui variabel faktor penduga, dilakukan wawancara kepada responden masyarakat yang bermukim atau berkegiatan di lokasi inkonsistensi pemanfaatan ruang. Selain itu, dilakukan wawancara melalui metode *expert judgement*.

Pada tahap awal, dilakukan penetapan variabel faktor penduga berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Sitorus dkk. (2012) menyatakan bahwa variabel penduga terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yaitu : kepadatan penduduk, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah fasilitas pendidikan, jarak dari permukiman terdekat, jarak dari jalan, jarak dari pusat ekonomi dan jarak dari pusat pemerintahan. Sementara itu, Dani dkk. (2017) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, tidak adanya perizinan, kebutuhan tempat tinggal, adanya fasilitas umum dan aksesibilitas, penggunaan lahan telah ada sebelum rencana pola ruang ditetapkan, berpindahnya kepemilikan lahan dan fasilitas pertanian kurang mendukung. Penelitian yang dilakukan Sejati, A.P dkk. (2018) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksiharasan penggunaan lahan dengan pola ruang yaitu faktor kebutuhan ekonomi, kebutuhan tempat tinggal, jarak dari pusat ekonomi, jarak dari jalan, kurangnya sosialisasi dari masyarakat, kepadatan penduduk dan adanya fasilitas umum.

Dari beberapa variabel yang telah dijelaskan di atas, ditentukan variabel faktor penduga inkonsistensi pemanfaatan ruang yang terjadi melalui komparasi kecenderungan pemanfaatan ruang dan kondisi geografis di Kecamatan Bogor Selatan. Kecenderungan pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan Bogor Selatan merupakan kegiatan permukiman dan memiliki kondisi geografis topografi berupa perbukitan landai.

Tabel 1. Variabel Penduga Faktor Penyebab Inkonsistensi

No.	Variabel Penduga Faktor Penyebab
1	Kepadatan penduduk
2	Ketersediaan fasilitas kesehatan
3	Ketersediaan fasilitas pendidikan
4	Kebutuhan tempat tinggal
5	Ketersediaan fasilitas transportasi
6	Jarak dengan pusat pemerintahan
7	Kebutuhan ekonomi
8	Kondisi geografis
9	Kurangnya pengawasan dan penertiban

Sumber : Hasil Analisis, 2022

Setelah diketahui variabel penduga inkonsistensi pemanfaatan ruang, dilakukan penentuan faktor penyebab konsistensi dan inkonsistensi pemanfaatan ruang. Penentuan faktor penyebab konsistensi dan inkonsistensi pemanfaatan ruang dilakukan melalui wawancara terhadap responden yang melakukan kegiatan di lokasi terjadinya inkonsistensi pemanfaatan ruang. Selain itu, faktor-faktor penyebab konsisten dan inkonsisten pemanfaatan ruang di tentukan juga berdasarkan pendapat ahli melalui *expert judgement*.

Wawancara dilakukan pada lokasi yang masuk ke dalam kelompok inkonsistensi pemanfaatan ruang dengan penetapan sampel responden yang merupakan pengguna lahan pada kawasan yang terindikasi terjadi inkonsistensi pemanfaatan ruang. Jumlah sampel yang diambil adalah 100 sampel.

Untuk menambah penguatan hasil wawancara, dilakukan pengambilan keputusan/ pendapat yang bersumber dari pakar (*expert judgement*) di bidang tata ruang. Dalam melakukan metode *expert judgement* dapat dilakukan melalui tahapan dan prosedur sebagai berikut :

- Memilih dan mengonfirmasikan aktivitas yang akan dianalisis
- Membuat daftar pernyataan
- Memilih para ahli
- Meminta para ahli memberikan penilaian/ jawaban
- Meminta para ahli untuk melakukan revisi jawaban mereka

Dalam melakukan penilaian, para ahli akan memberikan rentang nilai 0 - 100 terhadap variabel penduga faktor penyebab terjadinya inkonsistensi pemanfaatan ruang. Terhadap nilai tersebut, akan dilakukan perhitungan rata-rata untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor tersebut berpengaruh berdasarkan *expert judgement*. Adapun kriteria dan pakar yang akan menjadi responden dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2. Kriteria dan Penentuan Pakar

Kriteria	Lembaga/ Instansi	Nama
Pemerintah	Kementerian ATR/ BPN	Gunung Hariyadi, S.T, M.T.
	Dinas PUPR Kota Bogor	Naufal
Akademisi/ Peneliti	P4W LPPM IPB	Zulfikar
Praktisi	Tenaga Ahli Bidang PWK	Prayoga. A. Purnama, S.T, M.Eng.

Sumber : Hasil Analisis, 2022

2.3. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Inkonsisten

Setelah diketahui hasil analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, maka diperlukan rumusan rekomendasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, rekomendasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui *benchmarking* kegiatan dalam rangka pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. *Benchmarking* dilakukan berdasarkan program intansi pemerintah di wilayah Kota Bogor yang merujuk pada program dalam rangka pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang yang tertera di dalam indikasi program dokumen RTRW.

Selain *benchmarking*, penentuan rekomendasi dibuat berdasarkan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi dari faktor-faktor kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal sebagai penentu suatu kesuksesan yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

INTERNAL EKSTERNAL	Strengths	Weaknesses
Opportunities	Strategi SO: mengoptimalkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada.	Strategi WO: mengoptimalkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.
Threats	Strategi ST: mengoptimalkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghadapi ancaman (T).	Strategi WT: mengoptimalkan suatu strategi dalam mengatasi kelemahan (W) dan menghadapi ancaman (T).

Gambar 1. Metode SWOT

Dalam studi kasus ini, faktor-faktor dari variabel penduga penyebab terjadinya inkonsistensi pemanfaatan ruang di tentukan apakah faktor tersebut merupakan faktor internal atau faktor eksternal. Setelah diketahui klasifikasi faktor-faktor tersebut, dilakukan strategi untuk menjawab faktor-faktor tersebut berdasarkan studi kasus program pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dilakukan *benchmarking*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Analisis Konsistensi Pemanfaatan Ruang

Jenis pemanfaatan ruang didominasi oleh jenis permukiman dan tempat kegiatan dengan luas sebesar 1.520,91 ha, jenis penggunaan lahan sebesar 406,41 ha, dan jenis penggunaan lahan mendominasi lainnya adalah sawah dengan luasan sebesar 397,26 ha.

Tabel 1. Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Gedung/Bangunan	7,12
2	Perkebunan/Kebun	406,41
3	Permukiman dan Tempat Kegiatan	1.520,91
4	Sawah	397,26
5	Semak Belukar	144,36
6	Sungai	30,2
7	Tanah Kosong/Gundul	233,37
8	Tegalan/Ladang	308,04
Luas Total		3.047,67

Sumber: Hasil Analisis GIS, 2021



Gambar 2. Peta Pemanfaatan Ruang Kecamatan Bogor Selatan

Dari hasil analisis pertampalan peta yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebesar 162,44 hektar (5,33%) kawasan merupakan kawasan terjadinya inkonsistensi pemanfaatan ruang. Sementara itu, seluas 2.885,23 hektar (94,67%) merupakan lokasi yang pemanfaatan ruangnya konsisten. Secara rinci hasil pertampalan peta inkonsistensi pemanfaatan ruang dijelaskan pada Tabel 4 dan Gambar 4.

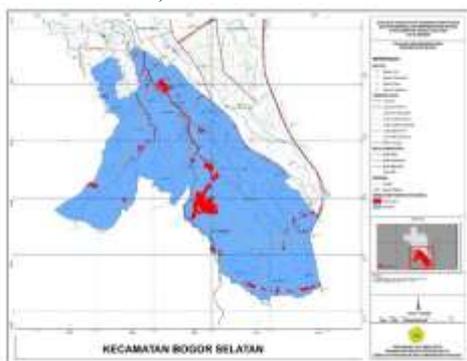
Pemanfaatan ruang yang konsisten paling besar berada pada pola ruang peruntukan rumah rendah dengan pemanfaatan ruang berupa permukiman dan tempat kegiatan dengan luas 1.010,06 hektar, sementara itu pemanfaatan ruang konsisten paling kecil berada pada pola ruang peruntukan rumah sedang dengan penggunaan lahan berupa sungai seluas 0,05 hektar yang terjadi akibat perbedaan skala penggambaran dalam peta serta perbedaan

teknik digitasi dan sumber data citra yang digunakan.

Tabel 2. Konsistensi Pemanfaatan Ruang berdasarkan Jenis Pemanfaatan Ruang dan Rencana Pola Ruang

RENCANA POLA RUANG	PEMANFAATAN RUANG	LUAS (Ha)
RTH	Permukiman dan Tempat Kegiatan	1,32
RTH Infrastruktur	Permukiman dan Tempat Kegiatan	0,01
Sempadan Jalan Tol	Gedung/Bangunan	0,55
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	24,19
Sempadan Rel KA	Permukiman dan Tempat Kegiatan	16,28
	Gedung/Bangunan	0,01
Sempadan Saluran	Permukiman dan Tempat Kegiatan	12,26
	Gedung/Bangunan	0,03
Sempadan Sungai	Permukiman dan Tempat Kegiatan	23,86
	Perkebunan/Kebun	4,82
Sungai	Permukiman dan Tempat Kegiatan	4,32
	Sawah	0,97
	Tegalan/Ladang	0,29
TPU	Permukiman dan Tempat Kegiatan	70,54
Utilitas Kota	Gedung/Bangunan	0,35
	Permukiman dan Tempat Kegiatan	2,64
Grand Total		162,44

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2022



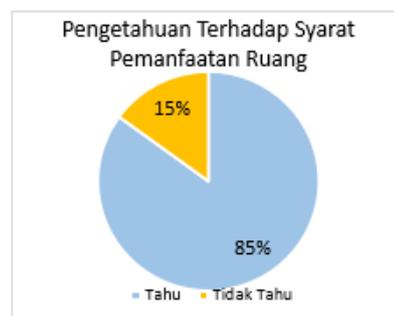
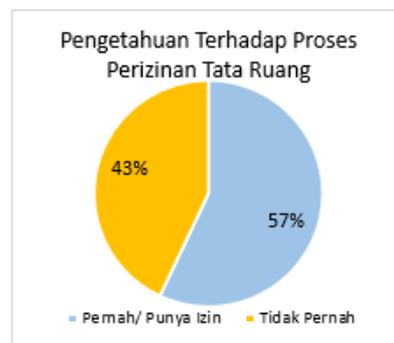
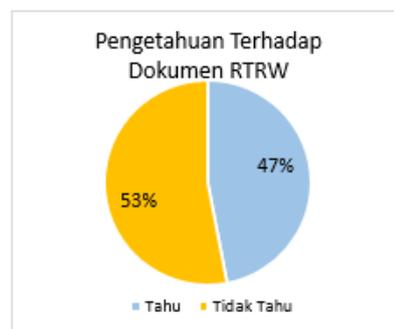
Gambar 1. Peta Konsistensi Pemanfaatan Ruang Kecamatan Bogor Selatan

3.2. Faktor Kesengajaan Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan hasil wawancara, 53 responden yang diwawancarai belum mengetahui produk hukum RTRW di mana hal tersebut menjadi salah satu faktor ketidaksengajaan terjadinya inkonsistensi pemanfaatan ruang. Hal tersebut dapat terjadi akibat mayoritas masyarakat di daerah tersebut belum pernah mendapatkan informasi melalui sosialisasi tentang dokumen RTRW.

Selain itu 15 responden juga belum mengetahui bahwa setiap pemanfaatan ruang wajib memiliki izin. Meskipun terdapat 85 responden yang

mengetahui bahwa setiap pemanfaatan ruang harus memiliki izin, namun pada kenyataannya baru 57 responden yang pernah mengurus perizinan dan/ atau telah memiliki izin pemanfaatan ruang. Hal tersebut berbanding lurus dengan pengetahuan terhadap muatan dokumen RTRW di mana di dalam dokumen RTRW telah mengamanatkan bahwa setiap pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang. Meskipun banyak masyarakat yang telah mengetahui syarat maupun prosedur pemanfaatan lahan dan/ atau bangunan, masyarakat merasa enggan untuk melakukan proses perizinan tersebut. Hal tersebut terjadi karena masyarakat berpendapat bahwa pemanfaatan ruang di atas lahan bersertifikat tidak perlu lagi untuk mendapatkan perizinan, meskipun hal tersebut berbanding terbalik dengan syarat yang tertuang dalam Undang-undang penataan ruang.



Gambar 2. Grafik Hasil Wawancara Faktor Kesengajaan Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang

3.3. Faktor dan Pengaruh Konsistensi Pemanfaatan Ruang

Faktor yang memberikan pengaruh tertinggi adalah kebutuhan tempat tinggal. Faktor tersebut masih sejalan dengan hasil penelitian Purwa (2020), di mana salah satu faktor penyebab terjadinya ketidakselarasan pemanfaatan ruang di Kota Jakarta Timur yaitu adalah kebutuhan tempat tinggal. Karakteristik pemanfaatan ruang perkotaan menjadi salah satu penyebab terjadinya inkonsistensi pemanfaatan ruang akibat desakan kebutuhan tempat tinggal. Isradjuningtiyas (2017) menyatakan hal yang serupa, di mana faktor terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kota Bandung lebih dominan diakibatkan faktor kebutuhan pasar yang di dukung oleh ketersediaannya fasilitas umum. Dalam penelitiannya, keberadaan Tol Cipularang menjadi daya tarik utama pelaku usaha membuka lapangan usahanya di Kota Bandung secara masif, sehingga seringkali pembangunan yang dilakukan tidak diimbangi dengan pengawasan oleh pemerintah daerah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan ruang di Kecamatan Bogor Selatan di dominasi oleh kegiatan berupa permukiman dan tempat kegiatan dengan luas sebesar 1.713,71 hektar; Terdapat 162,44 hektar lahan atau sebesar 5,33% pemanfaatan ruang yang tidak konsisten di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Sementara itu, seluas 2.885,23 hektar atau sebesar 94,67% pemanfaatan ruang termasuk ke dalam kriteria konsisten; Inkonsistensi pemanfaatan ruang di Kecamatan Bogor Selatan, terjadi akibat kesengajaan pemilik atau pengguna lahan di mana dari 100 responden, terdapat 85 responden yang mengetahui jika pemanfaatan ruang harus memiliki izin dan 57 responden yang pernah mengurus perizinan pemanfaatan ruang dan/ atau telah memiliki izin pemanfaatan ruang;
2. Faktor penyebab terjadinya inkonsistensi pemanfaatan ruang di Kecamatan Bogor Selatan meliputi : a. Kebutuhan tempat tinggal; b. Kurangnya pengawasan dan penertiban; c. Ketersediaan fasilitas Kesehatan; dan d. Kebutuhan ekonomi.

4.2. Saran

Mengurangi dampak akibat terjadinya inkonsistensi pemanfaatan ruang, terdapat

beberapa saran yang dapat dilakukan yaitu : Melakukan program pengendalian pemanfaatan ruang secara bersama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat; Melakukan program pengendalian pemanfaatan ruang berupa pengenaan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat; Melakukan program pengawasan perizinan yang diterbitkan melalui sistem OSS; Mengendalikan dan menata investasi yang masuk ke wilayah Kota Bogor; Melakukan penataan dan perencanaan persebaran fasilitas umum secara merata; dan Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan penyediaan tempat tinggal sesuai dengan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akil, M.A.A. (2020). Penyuluhan Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. *Jurnal Tekonologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat*, Volume 3 (1): 71-80.
- [2] Arfiani, I. (2012). Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan dan Pencarian Rumah Sakit Yogyakarta. *Jurnal Informatika*, Volume 6 (2).
- [3] Dani, E.T., Sitorus, S.R.P., & Munibah, K. (2017). Analisis Penggunaan Lahan dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor. *Tata Loka*, Volume 19 (1): 40-52.
- [4] Hasyim, M. (2003). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (Studi Kasus di Kota Yogyakarta). *Jurnal Hukum*, Volume 10 (22): 102-120.
- [5] Hidajat, J.T., Sitorus, S.R.P., Rustiadi, E., & Machfud (2013). Dinamika Pertumbuhan Dan Status Keberlanjutan Kawasan Permukiman Di Pinggiran Kota Wilayah Metropolitan Jakarta. *Globe*, Volume 15 (1): 93-100.
- [6] Ikmal, M. (2017). Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 1 (1): 88-96.
- [7] Muhajir, A. (2017). Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Pelaksanaan Ketentuan Penataan Ruang Di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 2 (2): 184-193.

- [8] Novrizanjaya, R. (2013). Analisis Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kesesuaian Pengalokasian Ruang, Dan Nilai Land Rent Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Skripsi*. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- [9] Nurmawati, I. (2016). Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Sebagai Kendali Tata Ruang di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 (Studi Tentang Pembangunan Apartemen). *Lex Renaissance*, Volume 2 (1): 152-165.
- [10] [Pemkot Bogor] Pemerintah Kota Bogor. 2021. *Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031*. Bogor (ID): Pemerintah Kota Bogor
- [11] Prayitno, S., Hadi, S., & Manuwoto, M. (2016). Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Dalam Mendukung Program Pembangun. *Tata Loka*, Volume 18 (2): 96-107.
- [12] Rachmawaty, S. (2008). Analisis Konsistensi Pola Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang (Studi Kasus Kota Palu). *Tesis*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- [13] Romony, P.J., Takumansang, E.D., Supardjo, S. (2017). Evaluasi Inkonsistensi Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Singkil Kota Manado. *Spasial*, Volume 4 (3).
- [14] Sejati, A.P., Sitorus, S.R.P., & Hidayat, J.T. (2018). Analisis Keselarasan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Pola Ruang dan Pengendaliannya di Kota Jakarta Timur. *Tesis*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- [15] Sitorus, S.R.P., Patria, S.I.D., & Panuju, D.R. (2012). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Ruang Terbuka Hijau Di Jakarta Timur. *Jurnal Lanskap Indonesia*, Volume 4 (2): 28-36.
- [16] Sushanti, I.R. dkk. (2018). Kajian Perubahan Fisik Spasial Kawasan Urban Fringer di Kecamatan Ampenan Kota Mataram. *Jurnal Planoearth*, Volume 3 (2): 44-48.
- [17] Tenrisau, A. (2019). Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Melalui Penegakan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Rencana Tata Ruang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. *Aktualita*, Volume 2 (2): 402-421.
- [18] Wahyuni, E. (2006). Analisis Keterkaitan Permasalahan Tata Ruang Dengan Kinerja Perkembangan Wilayah (Studi Kasus Kota Bandar Lampung). *Tesis*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Insititut Pertanian Bogor.